

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PENDEKATAN KUALITATIF DI MTS JAGAT RAYA, DESA KEDONGDONG, KECAMATAN SUSUKAN, KABUPATEN CIREBON

THE PRINCIPAL'S LEADERSHIP STRATEGY ON THE EDUCATIONAL POLICY PROBLEMS: QUALITATIVE APPROACHE IN MTS JAGAT RAYA, KEDONGDONG VILLAGE, SUSUKAN, CIREBON REGENCY

Nurkholifatul Maula
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang - Jl. Colombo No. 1 Depok, Sleman Yogyakarta
maulanurkholifatul89@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of education policies in schools has various polemics. One of them occurs in private schools. These problems affect several factors. Among them are the leadership factors of the principal. This study aims to identify the problems of education policy faced by the school and the strategies faced by the principal on the problem. The study conducted by qualitative descriptive approach. Collecting data using interview and observation. As for the results of this study, there are two policy problems, there are Final Examination Draft that still have to be sourced from the Ministry of Religion and the rules of time teaching often change. To overcome this problem, the school principal provides assistance to students and meets the teacher's working hours by teaching in other schools.

Key Words: Leadership Strategy, and Educational Policy, Madrasah Tsanawiyah (MTs)

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pendidikan di sekolah memiliki berbagai polemik. Salah satunya terjadi di sekolah swasta. Permasalahan tersebut mempengaruhi beberapa faktor. Diantaranya yaitu faktor kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah dan strategi yang dihadapi kepala sekolah dalam menangani masalah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan dengan wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat dua permasalahan kebijakan yaitu mengenai pembuatan soal yang masih harus bersumber pada kementerian agama dan beban kerja guru yang sering kali berubah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kepala sekolah melakukan pendampingan kepada siswa dan memenuhi jam kerja guru dengan mengajar di sekolah lain.

Kata Kunci: Strategi Kepemimpinan, dan Kebijakan Pendidikan, Madrasah Tsanawiah (MTs)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang secara terus menerus akan mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diharapkan sekolah mampu untuk mengimplementasikannya sesuai dengan sumber daya yang ada.

Namun penerapan kebijakan pendidikan tidak semudah yang diharapkan oleh pemerintah. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Berikut beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Seperti yang dilansir oleh berita pikiran rakyat (www.pikiran-rakyat.com/ tanggal 5 Juli 2017)

menyatakan bahwa masalah pendidikan di Indonesia lebih banyak pada persoalan implementasi kebijakan. Regulasi yang dibuat di tingkat kementerian terganjal saat implementasi, karena adanya otonomi pendidikan di daerah.

Lebih dalam lagi mengenai permasalahan pada kebijakan pendidikan bisa dilihat dari hal yang lebih kecil, yaitu dari skala sekolah, yang tentunya masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan sekolah, terjadi pada sekolah dasar di Yogyakarta dalam menerapkan sekolah inklusif. Kendala tersebut berhubungan dengan sumber daya yang ada.

Diantaranya yaitu: kepala sekolah, guru, dan orang tua kurang memahami konsep mengenai pendidikan inklusif (Efika, 2016).

Selain sekolah inklusif, yang perlu diperhatikan kembali adalah sekolah swasta. Selain polemik pada sekolah negeri, tetapi kenyataannya sekolah swasta di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak menjadi pihak yang direpotkan juga dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Salah satu permasalahan kebijakan pendidikan yang cukup krusial dirasakan oleh sekolah swasta ialah faktor biaya. Diharapkan anggaran dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan, namun pada nyatanya tidak serta merta masalah tersebut dapat selesai dengan mudahnya (Sudarmanto, 2010).

Berbagai permasalahan implementasi kebijakan pendidikan terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu: sumber daya sekolah yang ada (guru, masyarakat dan kepala sekolah).

Salah satu sekolah swasta yang mengalami permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan ialah MTs Jagat Raya di desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. MTs Jagat Raya mengalami kendala dalam hal kebijakan pembuatan soal ujian akhir sekolah dan beban kerja guru. Permasalahan di MTs Jagat Raya dalam menghadapi kebijakan pendidikan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, sehingga dapat dijadikan contoh dan sampel kajian guna memproyeksikan masalah sekolah swasta terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan apa saja yang dapat membuat permasalahan di sekolah swasta, dan bagaimana strategi kepala sekolah dalam menghadapi kebijakan pendidikan tersebut.

Merujuk pada pengertian dari William N Dunn (1999) menyatakan bahwa suatu kebijakan merupakan hasil dari sebuah penelitian terhadap suatu isu yang berada di suatu negara dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan dan relevansi ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pada pendapat dari William N Dunn, suatu kebijakan akan terus berkembang dan diperbaiki. Pembentukan suatu kebijakan tentunya membutuhkan proses yang cukup lama. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan, yang mana banyak hal yang perlu diperhatikan dari setiap sumber daya yang ada.

Pemimpin di suatu sekolah atau kepala sekolah berperan penting dalam hal mengatasi berbagai permasalahan kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolahnya.

Adapun hasil penelitian dari Nurhikmat Romadhona (2017) yang menguatkan argumen pentingnya strategi kepala sekolah dalam mengatasi problematika kebijakan pendidikan, yang tertuang dalam penelitiannya mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah dasar terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan efektivitas sekolah.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan pelaksanaan kebijakan Sekolah Dasar Negeri berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala sekolah adapun besar pengaruh pelaksanaan kebijakan Sekolah Dasar Negeri terhadap kepemimpinan kepala sekolah ialah sebesar 30,35% sedangkan sisanya sebesar 69,65% dipengaruhi oleh variabel lain (seperti kompetensi, dukungan sarana pra sarana dan lain sebagainya). Adanya pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap kepemimpinan mengindikasikan bahwa pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinan apabila didukung oleh aspek implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Merujuk pendapat dari Mayer dan Greenwood dalam Ulber Silalahi, (2011) mendefinisikan bahwa deskripsi kualitatif merupakan melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

Penelitian ini dilakukan di MTs Jagat Raya di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Beberapa pertimbangan memilih sekolah tersebut diantaranya yaitu: sekolah swasta yang memiliki beragam permasalahan (kekurangan siswa, sarana pra sarana, dan sumber daya manusia). Ditambah lagi dengan perubahan kebijakan pendidikan pada setiap periode pergantian menteri. Tidak sedikit sekolah yang menjadikan perubahan kebijakan menjadi sebuah permasalahan sekaligus tantangan. Oleh Karena itu perlu adanya penelitian mendalam mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah pada MTs Jagat Raya dan mengidentifikasi kebijakan pendidikan yang dirasa sebagai masalah oleh sekolah. Hasil dari penelitian ini pun dapat digunakan sebagai

perbaikan strategi kepemimpinan kepala sekolah dan kebijakan pendidikan.

Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Diantaranya yaitu: wawancara, observasi atau pengamatan langsung. Wawancara langsung bertujuan untuk mencari informasi mengenai strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan wawancara pun dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara mendalam strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam menghadapi problematika kebijakan pendidikan. Observasi dilakukan guna mengamati kegiatan keseluruhan dari kepala sekolah yang berkaitan erat dengan strategi yang dilakukannya.

Sugiyono (2016:337) menjelaskan mengenai metode analisis Miles and Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun langkah-langkah dalam metode Miles and Huberman yaitu: periode pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun metode Miles and Huberman pada penelitian ini ialah:

1. Periode pengumpulan Data: pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.
2. Reduksi data: pada reduksi data, peneliti menyaring data-data mana saja yang perlu ditindak lanjuti dan membuang data-data yang tidak dibutuhkan.
3. *Display* Data: tahapan ini peneliti telah menggunakan data yang didapat guna menyusun sebuah laporan.
4. Kesimpulan atau verifikasi: setelah memaparkan data pada suatu laporan, maka data tersebut akan diverifikasi apakah sudah terpenuhi atau masih membutuhkan data lainnya.

MTs Jagat Raya merupakan sekolah swasta yang bersifat islami dibawah naungan kementerian agama. Kebijakan pendidikan yang digunakan di MTs Jagat Raya perpaduan antara kebijakan dari kementerian agama dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Adapun kebijakan dari kementerian agama salah satu yang dipakai yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kepala madrasah mulai dari syarat untuk menjadi

kepala madrasah, kompetensi, dan lainnya. Hal ini yang digunakan sebagai pedoman dalam menggunakan atau menerapkan strategi guna mengatasi permasalahan kebijakan pendidikan.

Permasalahan kebijakan pendidikan yang dirasakan menjadi sebuah masalah bagi kepala madrasah MTs Jagat Raya ialah pengadaan naskah soal Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) yang masih harus dibuatkan dan bersumber dari kementerian agama provinsi.

Pada wawancara dengan kepala sekolah, Bapak H.Daenuri mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi sebuah masalah dikarenakan ada beberapa soal yang belum diajarkan oleh guru di sekolah. Hal ini mengakibatkan nilai siswa yang kurang bagus, serta dapat mempengaruhi pencapaian nilai akhir bagi siswa.

Selain faktor terjadinya ketidakrelevansian antara materi yang diajarkan dengan soal ujian, yaitu faktor keuangan. Dikarenakan harus adanya anggaran untuk membeli naskah soal ujian akhir tersebut. Sedangkan, sumber dana di MTs Jagat Raya hanya berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana BOS sendiri sering mengalami keterlambatan. Sehingga harus menggunakan dana talangan terlebih dahulu.

Melihat dari analisis permasalahan terhadap implementasi nya suatu kebijakan pendidikan di sekolah, banyak faktor lain yang menjadikan suatu kebijakan tersebut menjadi sebuah masalah bagi suatu sekolah. Diantaranya yaitu: sumber daya guru, dan anggaran.

Masing-masing sekolah memiliki sumber daya yang berbeda dan permasalahan yang berbeda pula dihadapi sekolah tersebut. Itu artinya dalam implementasi sebuah kebijakan pendidikan di sekolah harus melihat secara holistik kekurangan dan kelebihan sumber daya yang dimiliki suatu sekolah.

Kepala Madrasah MTs Jagat Raya mengungkapkan kembali alasan mengapa kebijakan tersebut menjadi sebuah masalah. Hal itu dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana pra sarana yang seharusnya menunjang pembelajaran dan pemahaman materi pelajaran tidak memenuhi. Sehingga hal itu mempengaruhi pemahaman siswa untuk mencapai nilai yang baik di akhir ujian sekolah.

Jika sarana prasarana memadai di MTs Jagat Raya, maka akan membantu dan meminimalisir dampak masalah dari kebijakan pengadaan soal tersebut.

Selain masalah pengadaan soal, salah satu masalah kebijakan pendidikan yang teridentifikasi ialah kebijakan pemenuhan beban kerja bagi guru yang selalu berubah-ubah.

Hal tersebut dikatakan sebuah masalah bagi kepala sekolah MTs Jagat Raya karena beban guru yang selalu berubah-ubah mengakibatkan harus ada penyesuaian jumlah jam mengajar dan pembagian tugas tambahan guru untuk mencukupinya. Karena berdampak pada cair tidaknya tunjangan sertifikasi guru tersebut.

Terdapat dua kali perubahan peraturan mengenai beban kerja guru. Diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) (PP No. 19 Tahun 2017) menjelaskan mengenai beban kerja guru sebagai berikut.

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. Membimbing dan melatih peserta didik;
 - e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Menilik peraturan baru mengenai beban kerja guru yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Berikut rincian Pasal 2 dan 3 mengenai beban kerja guru:

Pasal 2 ayat (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

Berikut bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) (PP No. 19 Tahun 2017)

- (1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) bagi guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Melihat kedua peraturan pada tahun 2017 dan 2018 mengenai beban kerja guru memang mengalami perubahan. Merujuk pada pendapat dari kepala sekolah MTs Jagat Raya menyatakan bahwa hal tersebut menimbulkan sebuah permasalahan yang mengakibatkan harus ada penyesuaian jumlah jam mengajar dan pembagian tugas tambahan guru untuk mencukupinya. Hal tersebut berdampak pada cair tidaknya tunjangan sertifikasi guru.

Penambahan jumlah jam mengajar bagi guru menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi MTs Jagat Raya dikarenakan jumlah guru lebih banyak dibandingkan dengan siswanya. Jumlah siswa terus stagnan bahkan mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan setiap tahunnya. Sehingga jumlah rombel paling tidak harus ada enam rombel terkait dengan pembagian jam mengajar dan tugas tambahannya terutama bagi guru sertifikasi agar minimal terpenuhi syarat dua puluh empat jam.

Melihat permasalahan implementasi kebijakan tersebut, sehingga mempengaruhi beberapa

hal yang berada di lingkungan internal MTs Jagat Raya. Permasalahan kebijakan pembuatan soal yang masih bersumber dari kementerian agama provinsi, dan beban jam mengajar guru memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dengan kekurangannya siswa dan jumlah guru yang lebih banyak dibandingkan siswanya, secara terpaksa pemenuhan tugas mengajar guru dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membebani fokus guru dalam mengajar. Sedangkan, untuk penanganan masalah kebijakan yang menyangkut pembuatan soal masih bersumber di kementerian agama, diperlukan fokus guru dalam pembelajaran di kelas.

Menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, perlu adanya strategi dalam menjalankan kepemimpinan dan manajerial di sekolah. Strategi dalam implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan kepala sekolah MTs Jagat Raya dimulai dengan penetapan adanya kebijakan pendidikan baru.

Adapun yang dilakukan kepala sekolah MTs Jagat Raya ketika akan menerapkan kebijakan pendidikan yaitu: pertama, setelah kepala sekolah melakukan rapat koordinasi tentang sosialisasi peraturan baru, kepala sekolah akan menyampaikannya pada agenda rapat guru dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi madrasah.

Kepala sekolah melihat pertimbangan dari guru-guru jika kebijakan pendidikan tersebut harus berdasarkan pertimbangan guru dan sumber daya lainnya. Contohnya yaitu kebijakan dalam implementasi kurikulum muatan lokal, yang mana harus memenuhi usulan seluruh guru dan pertimbangan lainnya. Sedangkan, kebijakan dasar seperti peraturan mengenai guru atau ketentuan lainnya, tidak diperlukan adanya pertimbangan dari guru atau sumber daya lainnya.

Dalam menghadapi permasalahan kebijakan tentang soal ujian akhir yang masih harus bersumber pada kementerian agama provinsi, kepala sekolah dengan menerapkan siasat yaitu menginstruksikan guru-guru untuk menyampaikan kisi-kisi soal dan mendampingi siswa selama seminggu sebelum ujian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik.

Selain dari relevansi soal dan materi pelajaran yang terkadang tidak sesuai, yaitu pendanaan

untuk anggaran pembelian soal ujian akhir tersebut. Kepala sekolah menyatakan bahwa untuk penganggaran selama uang BOS belum cair, dengan menggunakan dana talangan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari komitmen dan konsistensinya selama memimpin MTs Jagat Raya mulai dari pertama sekali MTs jagat Raya didirikan, hingga sekarang.

Mengenai permasalahan dalam hal perubahan beban jam mengajar guru, kepala sekolah menerapkan strategi dengan merekomendasikan guru untuk mengajar di sekolah lain agar jam mengajarnya tercukupi.

KESIMPULAN

Terdapat dua kebijakan yang menjadi persoalan bagi MTs jagat Raya, yaitu: pertama, masalah soal ujian akhir yang masih bersumber dari kementerian agama provinsi dan harus membayarnya, serta pernah terjadinya ketidak relevan-an antara materi yang diajarkan dengan soal ujian akhir. Kedua, sering bergantinya beban mengajar guru.

Berdasarkan kedua masalah tersebut, maka kepala sekolah MTs Jagat Raya menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi masalah tersebut. Diantaranya yaitu: pertama, dengan menginstruksikan guru untuk memberikan kisi-kisi dan mendampingi siswa dalam belajar selama seminggu sebelum ujian. Kedua, kepala sekolah merekomendasikan guru MTs Jagat Raya untuk mengajar di sekolah lain guna memenuhi beban jam mengajarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti. Diantaranya yaitu:

- (1) Perlu adanya perbaikan strategi mendalam dan tepat sasaran dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat membantu MTs Jagat Raya menghadapi masalah kebijakan pendidikan.
- (2) Perlu adanya peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
- (3) Pemerintah harus lebih memperhatikan implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan pendidikan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn N, William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Efika N, Lubis. 2016. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se-Kota Yogyakarta*. Jurnal kebijakan pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Edisi 5 Vol.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Romadhona, Nurhikmat. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan di Sekolah Dasar Negeri terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Sekolah*. Jurnal Khazanah Akademia. Vol. 01; No. 01.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2010. *Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah (Permasalahan dan Prospeknya)*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit ALFABETA
- www.pikiran-rakyat.com (diakses pada tanggal 10 September 2018).